

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet III, Jakarta: SinarGrafika.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Yogyakarta: Karya Media.
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Satrio J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta: PT Intermasa, Cetakan ke XII.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Cet.3, Kencana.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung Wiryono prodjodikoro, 1992, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Cet.11, Penerbit Sumur.
- Yahya Harahap M, 1986, *Segi –segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Yusuf Sofie, 2008, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2012, Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Jurnal Performa*, Volume 11, Nomor 2, 2012.

Fatia Gupta, 2018, Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online di Beteng Trade Center Surakarta, *Jurnal Privat Law*, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Hartana, 2016, Hukum Perjanjian, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2016.

I Gusti Ngurah Anom, 2015, Addndum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Nomor 2, 2015.

Lintang Yudhantaka, 2017, Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling, *Jurnal Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, 2017.

Novi Ratna Sari, 2017, Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Novina Sri Indiraharti, 2014, Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 4, Nomor 1, 2014.

Nurpanca Sitorus, 2014, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, *USU Law Journal*, Volume 2, Nomor 3, 2014.

Retno Puspo Dewi, 2017, Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akibat Wanprestasi, *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Ruli Firmansyah, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, *Jurnal Legal Opinion*, Volume 2, Nomor 5, 2014.

Taufiq El Rahman dkk, 2011, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-kontrak Outsourcing, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, 2011.

Widi Nugrahaningsih, 2017, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2017.

Wisnu Aryo Dewanto, 2015, Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Yuniaristanto dkk, 2012, Perancangan Sistem Manajemen Perusahaan Pengembang Perumahan CV.ABC, *Jurnal Performa*, Volume 11, Nomor 2, 2012.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang “Perumahan dan Permukiman”.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang “Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang “Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan”.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang “Pedoman Pengikatan Jual Beli”.

Internet

Muh. Taufiq Amin, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Dalam Praktek Jual Beli Properti di Makassar”, *Jurisprudentie* Nomor 1, 2018

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4590/0>
diunduh pada hari Rabu 06 November 2018, jam 23.03 WIB